



Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris terhadap Manajemen Pembelajaran dalam Mewujudkan Kinerja Guru

Yusuf Hidayat

Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Garut

Abstrak. Tujuan penulisan artikel ini adalah membahas tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) terhadap manajemen pembelajaran bahasa Inggris dalam mewujudkan kinerja guru bahasa Inggris pada forum musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) yang berada dalam naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis. Metoda analisis dalam pembahasan topik utama ini menggunakan model analisis causal efektif dengan meninjau hubungan rasional yang menganalisa hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kebijakan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), manajemen pembelajaran bahasa Inggris dan kinerja guru bahasa Inggris. Lokasi penelitian dilakukan di forum musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) yang berada dalam naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis dengan jumlah responden sebanyak 88 orang. Pada pembahasan ini menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan kebijakan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen pembelajaran bahasa Inggris dan kinerja guru bahasa Inggris. Artikel ini berkesimpulan bahwa untuk mewujudkan kinerja guru bahasa Inggris dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dan manajemen pembelajaran bahasa Inggris.

Kata kunci: *pelaksanaan kebijakan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), manajemen pembelajaran bahasa Inggris, kinerja guru bahasa Inggris*

1. Pendahuluan

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada tanggal 8 Juli 2003 oleh Pemerintah telah mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan dalam kewenangan Pendidikan Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini secara otomatis menghasilkan ketentuan baru dalam fungsi, tujuan dan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah mengagendakan tiga kebijakan pokok dalam bidang pendidikan, yaitu:

1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan;
2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing;
3. Penguatan tata kelola (*governance*), akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Pada tataran perluasan dan pemerataan akses pendidikan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab IV, pasal 5 ayat (1) dan (5) menyatakan bahwa: setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (ayat 1); setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat (ayat 5).

Sementara pada tataran peningkatan mutu dan penguatan tata kelola (*governance*), pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagai penjabaran Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tersebut, pemerintah mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S1 (strata 1) atau D-IV, yang kemudian ditunjang oleh kompetensi yang memadai serta ditunjang dengan sertifikat pendidik. Guna menunjang hal tersebut, maka para guru diwajibkan untuk dapat selalu meningkatkan kemampuan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, agar proses peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi guru terprogram dan terlaksana dengan baik, diperlukan suatu wadah pembinaan guru yang mandiri dan professional.

Secara umum fenomena masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Pelaksanaan kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan aktivitas kolaboratif MGMP yang belum berjalan dengan optimal. Aktivitas tersebut, diantaranya yaitu: (1) membuat dan berlatih menggunakan alat/ bahan pembelajaran, (2) mendatangkan pakar, (3) berlatih menggunakan pendekatan pembelajaran baru, (4) serta membahas isu-isu pendidikan terbaru.
- b. Manajemen pembelajaran bahasa Inggris sejatinya belum optimal dilaksanakan dalam forum MGMP. Adapun salah satu indikasinya adalah para guru bahasa Inggris belum menunjukkan potensinya secara efektif dan efisien. Hal itu terlihat dari masih adanya guru-guru bahasa Inggris yang belum membuat perencanaan pembelajaran yang matang dan terukur yang tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Disamping itu, perencanaan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar (PBM) tidak dievaluasi dengan seksama dan berkelanjutan, sehingga kekurangan dari perencanaan yang tertuang dalam RPP tidak dapat ditindaklanjuti untuk diadakan perbaikan.
- c. Kinerja guru bahasa Inggris yang belum optimal, dimana para guru tidak menguasai keempat skill kebahasaan (*four language skills*) dalam bahasa Inggris yang meliputi: skil mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Akan tetapi, sementara ini para guru baru menguasai aspek kebahasaan saja (*language aspects*) yang meliputi: aspek tata bahasa, kosa kata, dan pengucapan. Untuk lebih jelas mengenai gambaran tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Berdasarkan penjelasan di atas, kendala-kendala yang mempengaruhi ketidakefektifan program MGMP diantaranya muncul dari aspek pelaksanaan kebijakan, manajemen, dan kinerja. Ketiga aspek tersebut memiliki hubungan sebab akibat yang memerlukan pengkajian lebih lanjut. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka peneliti menetapkan suatu topik penelitian dengan suatu judul, **“Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Terhadap Manajemen Pembelajaran Bahasa Inggris Dalam Mewujudkan Kinerja Guru Bahasa Inggris.”**

2. Metodologi

Penelitian merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi dan/ atau data secara sistematis untuk menambah pemahaman terhadap suatu fenomena tertentu (Ramdhani, 2013). Penelitian menggunakan metode ilmiah dengan cara pengumpulan data dan uji analisis dari hipotesis (Ramdhani & Ramdhani, 2016). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis kuantitatif dengan teknik survei. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian deskriptif yaitu ada hubungannya dengan pemaparan suatu

fenomena atau hubungan antara dua atau lebih fenomena (Iskandar, 2015). Teknik survei yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan mengambil populasi secara sensus dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok untuk mengkaji fenomena atau gejala yang diamati. Pendekatan dan teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap fenomena yang diteliti, yaitu mengenai variabel-variabel Pelaksanaan kebijakan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), manajemen pembelajaran bahasa Inggris dan kinerja guru bahasa Inggris.

Kemudian untuk melihat kondisi objektif pada objek penelitian, peneliti menetapkan operasionalisasi variabel penelitian, yang disusun untuk memudahkan langkah-langkah dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang diperoleh dari responden sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi, dan asumsi-asumsi dari variabel-variabel penelitian yang ditetapkan. Adapun operasionalisasi variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Operasionalisasi variabel Penelitian

No	Variabel	Dimensi	Indikator
1	Kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) (X) (Edwards III dalam Iskandar, 2016)	1. Komunikasi	a. Komunikator
			b. Pesan
			c. Saluran
			d. Komunikan
			e. Umpan balik
		2. Struktur birokrasi	a. Tupoksi
			b. Wewenang
			c. Standar operasional prosedur (SOP)
			d. Koordinasi
			e. Pengawasan
		3. Disposisi atau sikap dan perilaku aparatur	a. Anggaran
			b. Prasarana
			c. Sarana
			d. Alat-alat
		4. Sumberdaya organisasi	a. Bekerja berdasarkan rencana
			b. Konsultasi
c. Evaluasi			
d. Laporan			
2	Manajemen Pembelajaran bahasa Inggris (Y) (Terry, dalam Iskandar, 2016)	1. Perencanaan (<i>planning</i>)	a. Pemetaan masalah dan tujuan
			b. Pengumpulan data
			c. Analisis data
			d. Penentuan kegiatan
		2. Pengorganisasian (<i>organizing</i>)	a. Menempatkan pegawai dalam jabatan-jabatan organisasi
			b. Menetapkan deskripsi tugas pekerjaan
			c. Mendistribusikan sumber-sumber organisasi

No	Variabel	Dimensi	Indikator
			d. Meningkatkan kompetensi pegawai
		3. Penggerakan (<i>actuating</i>)	a. Menentukan standar-standar pelaksanaan yang akan dilaksanakan
			b. Melakukan tindakan perbaikan
		4. Pengawasan (<i>controlling</i>)	a. Monitoring
			b. Supervisi
			c. Evaluasi
3	Kinerja Guru bahasa Inggris (Z) (Uno & Lamatenggo, 2014)	1. Kualitas kerja	a. Menguasai bahan
			b. Mengelola proses belajar mengajar
			c. Mengelola kelas
		2. Kecepatan/ Ketepatan kerja	a. Menggunakan media atau sumber belajar
			b. Menguasai landasan pendidikan
			c. Merencanakan program pengajaran
		3. Inisiatif dalam kerja	a. Memimpin kelas
			b. Mengelola interaksi belajar mengajar
			c. Melakukan penilaian hasil belajar siswa
		4. Kemampuan kerja	a. Menggunakan berbagai metode dalam pembelajaran
			b. Memahami dan melaksanakan fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan
		5. Komunikasi	a. Memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah
			b. Memahami dan dapat menafsirkan hasil-hasil penelitian untuk peningkatan kualitas pembelajaran

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi pelaksanaan kebijakan publik, dimana pelaksanaan kebijakan publik didefinisikan sebagai implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Untuk memperkuat hasil penelitian dilakukan verifikasi hasil penelitian dengan hasil observasi, wawancara, dan studi literatur sebagaimana yang direkomendasikan oleh Ramdhani & Ramdhani (2104), dan Ramdhani et al (2014).

Responden penelitian ini adalah guru-guru bahasa Inggris yang tergabung dalam forum MGMP di Kabupaten Ciamis, dengan jumlah populasi sebanyak 88 orang. Pembahasan dilakukan atas

pelaksanaan kebijakan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) sebagai upaya meningkatkan manajemen pembelajaran bahasa Inggris dalam mewujudkan kinerja guru bahasa Inggris.

3. Hasil dan Pembahasan

Wadah pembinaan guru yang dimaksud adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang mana diperuntukan bagi para guru pada jenjang SMP/ MTs/ SMPLB/ SMA/ MA/ SMALB, dan SMK/ MAK. Selanjutnya, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) difahami sebagai wadah berkumpulnya para guru Mata Pelajaran sejenis secara kolaboratif dalam satu wilayah tertentu (Kabupaten/ Kota) dalam rangka mengidentifikasi dan memecahkan masalah, menguji coba dan mengembangkan ide-ide baru dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Sehingga forum MGMP ini dipercaya sebagai salah satu media efektif untuk membina profesionalisme guru dalam kerangka kegiatan oleh-, dari-, dan- untuk guru. Disamping itu, MGMP dipercaya sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan guru yang meliputi kemampuan pedagogis, profesional, sosial, dan personal (Jalal, 2005)

Dikarenakan MGMP merupakan amanat Peraturan Pemerintah, maka secara formal MGM masuk ke dalam domain kebijakan publik yang harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin guna dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Winarno, 2016). Akan tetapi dalam kenyataan di lapangan, MGMP masih terbentur dengan kendala sehingga MGMP belum dapat menghasilkan kinerja guru yang optimal. Ketidakefektifan kinerja guru mata pelajaran, khususnya guru bahasa Inggris yang tergabung dalam MGMP disebabkan oleh kurangnya kualitas kerja para guru yang terlibat di dalamnya. Disamping itu terdapat aspek lain, seperti: kecepatan/ ketepatan kerja, inisiatif dalam bekerja, kemampuan kerja, dan komunikasi (Uno & Lamatenggo, 2014).

Dari kelima aspek di atas, aspek kualitas kerja dan kemampuan kerja adalah faktor utama yang dihadapi oleh para guru bahasa Inggris. Dalam praktiknya, para guru bahasa Inggris masih cenderung belum mampu memaksimalkan keahlian berbahasa mereka yang mencakup skill berbahasa (*language skills*), dan aspek berbahasa (*language aspects*). Skill berbahasa (*language skills*), mencakup kemampuan mendengarkan (*listening skill*), kemampuan berbicara (*speaking skill*), kemampuan membaca (*reading skill*), dan kemampuan menulis (*writing skill*). Sementara bentuk aspek berbahasa (*language aspects*) mencakup kemampuan menguasai tata bahasa (*grammar mastery*), kemampuan menguasai perbendaharaan kata (*vocabulary mastery*), serta kemampuan menguasai pengucapan (*pronunciation mastery*).

Selain faktor kinerja, aspek manajemen juga diduga menjadi salah satu faktor ketidakefektifan kinerja guru bahasa Inggris yang tergabung dalam forum MGMP. Dalam sebuah penyelenggaraan organisasi, para penyelenggara dan anggota yang terlibat dituntut dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen organisasi dengan optimal. Dalam konteks manajemen pembelajaran bahasa Inggris, guru bahasa Inggris selain mampu mempersembahkan kinerja yang optimal, mereka juga dituntut dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa Inggris yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber-sumber lainnya (Winardi, 1998 dalam Iskandar, 2016). Dalam manajemen, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen tersebut seyogyanya meliputi upaya bagaimana membuat perencanaan (*planning*), melakukan pengorganisasian (*organizing*), melakukan penggerakan (*actuating*), dan melakukan pengawasan (*controlling*) (Terry, dalam Iskandar, 2016).

Selain faktor manajemen yang dapat mempengaruhi keberhasilan aspek kinerja, faktor pelaksanaan kebijakan pemerintah juga diduga menjadi faktor penyebab ketidakefektifan kinerja tersebut. Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan kembali kepada pembuat kebijakan yaitu pemerintah, kemudian dilaksanakan oleh agen pelaksana kebijakan, kemudian alat yang dipakai dalam mensosialisasikan kebijakan, serta publik sebagai sasaran dari suatu kebijakan.

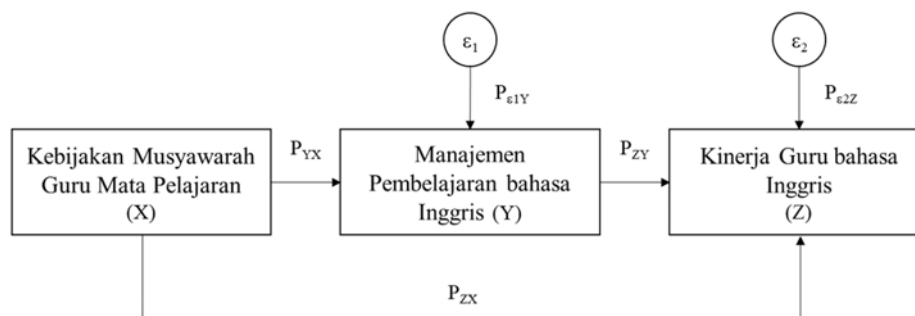
Dalam konteks kebijakan publik yang mengatur secara khusus mengenai Pendidikan di Indonesia, yang kemudian melahirkan MGMP, pemerintah pada awalnya menerbitkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada tanggal 8 Juli 2003 yang mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan dalam kewenangan Pendidikan Nasional Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai pelaksana kebijakan pendidikan yang langsung bersentuhan dengan publik di tingkat sekolah dan perguruan tinggi. Kemudian untuk memperkuat profesionalise guru, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sehingga PP tersebut melahirkan 4 peraturan yang menjadi dasar hukum dibentuknya MGMP. Keempat peraturan tersebut dituangkan dalam:

- a. Rambu-rambu pengembangan kegiatan MGMP;
- b. Prosedur operasional standar penyelenggaraan MGMP;
- c. Prosedur operasional standar pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan di MGMP; dan
- d. Standar pengembangan MGMP.

Dengan peraturan khusus yang mengatur MGMP ini, pemerintah berharap MGMP dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja guru khususnya guru bahasa Inggris dengan optimal. Sehingga pendidikan akan lebih dinamis, pengajaran akan lebih produktif sehingga memberikan efek puas kepada peserta didik, orang tua/ wali dan masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan publik ini.

3.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menguji fakta empiris tentang pengaruh pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) terhadap manajemen pembelajaran bahasa Inggris dalam mewujudkan kinerja guru bahasa Inggris. Selanjutnya untuk mempermudah analisis, dilakukan pemodelan terhadap fokus penelitian dalam bentuk paradigma penelitian. Model adalah penyederhanaan dari dunia nyata yang dapat memperlihatkan relasi antar variabel (Amin & Ramdhani, 2006). Paradigma penelitian yang dianalisis disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Paradigma Penelitian

Hasil penelitian menyajikan hasil perhitungan statistika, yang dapat diwakili dalam bentuk tabel, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Contoh hasil perhitungan

Hipotesis Utama	Koefisien Jalur	F _{hitung}	F _{tabel}	Determinan	Makna Hubungan
X→Y→Z Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) (X) terhadap Manajemen Pembelajaran Bahasa Inggris (Y) dalam Mewujudkan Kinerja Guru Bahasa Inggris (Z)	0,0726	0, 1485	3,1052	0,0726	Tidak Signifikan
Sub Hipotesis	Koefisien Jalur	t _{hitung}	t _{tabel}	Determinan	Makna Hubungan
X→Y Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) (X) terhadap Manajemen Pembelajaran Bahasa Inggris (Y)	0,3620	3,6014	1,9886	0,1311	Signifikan
X→Z Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) (X) terhadap Kinerja Guru Bahasa Inggris (Z)	0,0398	0,3409	1,9886	0,0023	Tidak Signifikan
Y→Z Pengaruh Manajemen Pembelajaran Bahasa Inggris (Y) terhadap Kinerja Guru Bahasa Inggris (Z)	0,0480	0,4405	1,9886	0,003	Tidak Signifikan

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengujian Hipotesis Utama (X→Y→Z)

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai F_{hitung} 0, 1485 lebih kecil dari F_{tabel} sebesar 3,1052. Dari nilai tersebut dapat ditarik kesimpulan statistik bahwa H₀ diterima, artinya terdapat pengaruh yang tidak signifikan dalam pelaksanaan kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) terhadap manajemen pembelajar bahasa Inggris dalam mewujudkan kinerja guru bahasa Inggris. Signifikansi nilai hasil pengujian, didukung pula oleh nilai Koefisien Determinasi (R²_{YZX}) sebesar 0,0726, sedangkan sisanya sebesar 0,9273 atau sebesar 92,73% dipengaruhi oleh variabel lain di

luar variabel Pelaksanaan kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen pembelajaran bahasa Inggris dalam mewujudkan kinerja guru bahasa Inggris. Sehingga dari perhitungan tersebut diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) secara tidak signifikan pula berdampak terhadap manajemen pembelajaran bahasa Inggris yang dengan sendirinya akan mewujudkan kinerja guru bahasa Inggris. Hal tersebut senada dengan pernyataan Edwards III (1980) (Iskandar, 2016) yang mengemukakan bahwa dalam setiap pelaksanaan kebijakan haruslah benar-benar memperhatikan dimensi-dimensi yang mengenai:

- a. Komunikasi;
- b. Struktur birokrasi;
- c. Disposisi atau sikap dan perilaku aparatur; dan
- d. Sumberdaya organisasi.

Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa dalam penggunaan komunikasi dilakukan dengan ringkas dan jelas supaya mudah untuk difahami oleh para komunikan. Di samping itu, struktur organisasi juga menentukan kualitas para pegawainya, dimana para pengurus MGMP mutlak mempunyai disposisi/ sikap yang baik dalam menyampaikan informasi berupa kebijakan pemerintah kepada para guru bahasa Inggris sehingga sumberdaya organisasi yang ada menjadi optimal. Dalam pelaksanaan berkomunikasi, komunikator harus dapat menyampaikan pesan dengan baik kepada para komunikan, yaitu mereka harus dapat menggunakan saluran yang tepat, sehingga upaya penyampaian informasi tentang Kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dapat mengenai sasaran. Dengan penyampaian informasi yang baik, maka tingkat kesadaran para guru bahasa Inggris akan pentingnya kinerja guru bahasa Inggris menjadi lebih baik. Walaupun demikian, berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat beberapa guru yang masih belum memahami makna kebijakan MGMP yang diimplementasikan di sekolah-sekolah SMA khususnya untuk MGMP Bahasa Inggris di Kabupaten Ciamis. Namun demikian, forum MGMP bahasa Inggris Kabupaten Ciamis tetap konsisten dalam melaksanakan kebijakan pemerintah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran Bahasa Inggris yang nantinya berujung pada peningkatan kualitas kinerja Guru Bahasa Inggris.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas kinerja guru tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan Kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) saja, namun juga dipengaruhi oleh manajemen guru bahasa Inggris. Dimana faktor perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan, serta pengawasan menjadi faktor yang perlu ditingkatkan untuk mewujudkan kinerja guru bahasa Inggris yang optimal. Di dalam program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis sendiri sudah melakukan kegiatan-kegiatan dengan tujuan meningkatkan kinerja guru, seperti mengikutsertakan guru dalam pelatihan, membentuk teamwork yang baik diantara guru dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selain pelaksanaan kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan manajemen pembelajaran Guru Bahasa Inggris, kinerja Guru Bahasa Inggris juga dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh faktor lain di luar pelaksanaan kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan manajemen pembelajaran Guru Bahasa Inggris adalah sebesar 92,73% (Epsilon). Faktor lain yang diduga mempengaruhi kinerja Guru Bahasa Inggris tersebut salah satunya adalah faktor motivasi. Faktor motivasi dimungkinkan sangat berperan dalam menggerakkan kepekaan dan kesadaran diri (Nurfajrinah, Nurhadi, & Ramdhani, 2017), para guru

Bahasa Inggris untuk selalu dapat meningkatkan kualitas kinerja dirinya sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa responden ketika peneliti melakukan wawancara.

3.2.2 Pengujian Sub Hipotesis 1 (X→Y)

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa pengaruh variabel pelaksanaan kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) terhadap manajemen pembelajaran bahasa Inggris masih relatif kecil sebesar 13,11% sedangkan sisanya sebesar 86,89% (Epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel pelaksanaan kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang tidak dimasukkan ke dalam model, misalnya lingkungan belajar (Ramdhani, 2017), media belajar (Aisyah et al., 2017; Helsy et al., 2017; Irwansyah et al., 2017; Sari et al., 2017, Ramdhani & Muhammadiyah, 2015), dan lain-lain.

Berdasarkan observasi di lapangan, diketahui bahwa dalam Pelaksanaan Kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Kabupaten Ciamis dibentuk berdasarkan rambu-rambu pengembangan kegiatan MGMP; prosedur operasional standar (SOP) penyelenggaraan MGMP; prosedur operasional standard (SOP) pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan di MGMP; dan standar pengembangan MGMP, dimana keempat regulasi tersebut bermuara pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Secara hirarki, UU No. 14 Tahun 2005 tersebut mengacu kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional belum diimplementasikan secara menyeluruh. Dengan adanya keempat regulasi yang mengatur eksistensi MGMP, Pemerintah mengharapkan para guru yang terlibat dalam program MGMP khususnya Guru Bahasa Inggris dapat selalu meningkatkan manajemen pembelajaran Bahasa Inggris, guna dapat memanager pendidikan yang lebih dinamis, pengajaran yang lebih produktif yang selanjutnya dapat memberikan efek puas kepada peserta didik, orang tua/ wali dan masyarakat pada umumnya sebagai sasaran dari kebijakan publik ini. Menurut pendapat penulis, dalam pelaksanaan manajemen pembelajaran Bahasa Inggris diperlukan pengawasan yang berkelanjutan sehingga implementasinya dapat sesuai dengan keempat SOP di atas. Karena dengan dijalankannya manajemen pembelajaran bahasa Inggris yang sesuai SOP, maka kinerja guru bahasa Inggris akan semakin baik.

3.2.3 Pengujian Sub Hipotesis 2 (X→Z)

Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui bahwa Pelaksanaan Kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Guru Bahasa Inggris. Besar pengaruh secara langsung dari Pelaksanaan Kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) terhadap Kinerja Guru Bahasa Inggris adalah sebesar 0,16%, sedangkan pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) terhadap Kinerja Guru Bahasa Inggris melalui Manajemen Pembelajaran Bahasa Inggris adalah sebesar 0,07%. Sehingga, jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Pelaksanaan Kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) terhadap Kinerja Guru Bahasa Inggris sebesar 0,23% sedangkan sisanya sebesar 99,54% (Epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Pelaksanaan Kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang tidak dimasukkan ke dalam model.

3.2.4 Pengujian Sub Hipotesis 3 (Y→Z)

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa pengaruh variabel manajemen pembelajaran bahasa Inggris terhadap variabel kinerja guru bahasa Inggris secara langsung adalah sebesar 0,30% sedangkan sisanya sebesar 99,70% (Epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel manajemen pembelajaran bahasa Inggris yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Dengan demikian kondisi ini menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran bahasa Inggris memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja guru bahasa Inggris. Semakin baik manajemen pembelajaran bahasa Inggris yang ditunjukkan oleh guru, maka akan semakin baik kinerja guru bahasa Inggris yang diberikan. Berdasarkan hasil observasi lapangan hasil penilaian responden terhadap variabel manajemen pembelajaran bahasa Inggris menunjukkan nilai dengan persentase sebesar 77,55% dan termasuk kriteria baik. Namun di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu guru anggota MGMP yang menilai bahwa Manajemen Pembelajaran Bahasa Inggris secara keseluruhan belum optimal. Beberapa alasan yang membuat penilaian Manajemen Pembelajaran Bahasa Inggris masih belum optimal antara lain; dalam sisi perencanaan: tidak semua guru Bahasa Inggris yang tergabung dalam MGMP mengetahui dan memahami perencanaan dalam pemetaan masalah dan tujuan. Dalam sisi pengorganisasian: tidak semua guru bahasa Inggris yang tergabung dalam MGMP selalu meningkatkan kompetensinya, kemudian penempatan guru dalam jabatan-jabatan organisasi belum sesuai dengan bidang keahliannya. Dalam sisi penggerakan: tidak semua guru bahasa Inggris yang tergabung dalam MGMP selalu melakukan tindakan perbaikan secara berkelanjutan ketika terdapat suatu kekurangan/ kesalahan. Dalam sisi pengawasan: tidak semua guru bahasa Inggris yang tergabung dalam MGMP selalu konsisten melakukan supervisi setiap bulan, dan evaluasi di akhir setiap semester.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pelaksanaan kebijakan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) terhadap manajemen pembelajaran bahasa Inggris dalam mewujudkan kinerja guru bahasa Inggris, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan variabel Pelaksanaan Kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) ditemukan permasalahan sebagai berikut: struktur organisasi MGMP belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, disposisi/ sikap yang baik mutlak dimiliki oleh pengurus dan segenap pimpinan MGMP dalam bekerjasama mengoptimalkan program MGMP, sumberdaya organisasi yaitu para guru bahasa Inggris di lingkungan MGMP Kabuapten Ciamis belum semuanya memahami makna kebijakan MGMP yang harus diimplementasikan. Berdasarkan latar belakang permasalahan pada Pelaksanaan Kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), maka penulis menyarankan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan sosialisasi tentang kebijakan Pemerintah terhadap program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) khususnya bagi Mata Pelajaran bahasa Inggris yang dilaksanakan pada satuan sekolah menengah atas (SMA). Hal ini penting mengingat masih kurangnya kesadaran para guru dalam keterlibatannya aktif dalam forum profesional guru mata pelajaran tersebut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas dan rinci kepada para guru mengenai kebijakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

- b. Menambah alokasi anggaran untuk sosialisasi agar kegiatan terlaksana sesuai tujuan yang ditetapkan.
- c. Melibatkan seluruh jajaran guru, kepala sekolah, dan unsur pimpinan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka merumuskan program/kegiatan sehingga keterlibatan dan gagasan seluruh unsur *stakeholder* dapat terakomodir.

Kedua, berkaitan dengan variabel Manajemen Pembelajaran Bahasa Inggris, yaitu ditemukan permasalahan sebagai berikut: tujuan yang telah dipetakan belum dapat diimplementasikan dengan optimal, monitoring kegiatan MGMP belum dilaksanakan secara berkelanjutan, dan supervisi belum dapat memberikan perbaikan administrasi guru. Berdasarkan latar belakang permasalahan pada Manajemen Pembelajaran Bahasa Inggris, maka penulis menyarankan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis dapat meningkatkan motivasi kerja para guru, kepala sekolah, serta pengawas. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Memberikan kesempatan kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis terkait pekerjaannya.
- b. Memacu para guru, khususnya guru bahasa Inggris untuk membuat inovasi kerja dalam rangka meningkatkan *outcome* program/kegiatan di masa depan.
- c. Meningkatkan kerjasama, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja untuk mempererat hubungan antar guru mata pelajaran lain.

Ketiga, berkaitan dengan variabel Kinerja Guru Bahasa Inggris ditemukan permasalahan sebagai berikut: belum semua guru bahasa Inggris membuat rencana pertemuan kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan kalender akademik, belum semua guru bahasa Inggris anggota MGMP dapat memberikan evaluasi atas hasil pekerjaan siswa agar siswa dapat mengetahui kelemahannya, dan kurangnya penerapan metode-metode pengajaran yang bersifat kekinian. Berdasarkan latar belakang permasalahan pada Kinerja Guru Bahasa Inggris, maka penulis menyarankan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis dapat meningkatkan kualitas keilmuan dan keterampilannya untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada peserta didiknya. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Membangun rasa empati para guru bahasa Inggris melalui berbagai pelatihan pengembangan diri, motivasi dan sebagainya.
- b. Menetapkan standar pengajaran dan pembelajaran sebagai suatu layanan yang harus diterapkan oleh seluruh guru, khususnya guru bahasa Inggris dalam melayani peserta didiknya.
- c. Penerapan *reward and punishment* bagi guru dalam melaksanakan standar pengajaran dan pembelajaran dalam melayani peserta didiknya.

Adapun saran untuk penelitian lebih lanjut, mengingat terdapat beberapa temuan penting pada penelitian serta keterbatasan dalam penelitian ini, maka diharapkan pada masa yang akan datang berbagai pihak dapat meneliti lebih lanjut faktor lain dari variabel-variabel penelitian ini. Penelitian lanjutan lain yang disarankan diantaranya mengenai motivasi, iklim organisasi, faktor tunjangan sertifikasi guru, kepemimpinan, *reward* dan *punishment*, serta komitmen guru dalam mendidik dan mengajar peserta didiknya.

Daftar Pustaka

Aisyah, R., Zakiyah, I. A., Farida, I., & Ramdhani, M. A. (2017). Learning Crude Oil by Using Scientific Literacy Comics. *Journal of Physics: Conference Series*, 895(1), 012011.

- Amin, A. S., & Ramdhani, M. A. (2006). Konfigurasi Model untuk Sistem Pendukung Keputusan. *Majalah Ilmiah Ekonomi Komputer*, 16(1), 11-19.
- Casio, W. F. (2006). *Managing Human Resources: Productivity, Quality of Worklife and Profits*. Singapore: Mc.Graw Hill International.
- Helsy, I., Maryamah, Farida, I., & Ramdhani, M. A. (2017). Volta-Based Cells Materials Chemical Multiple Representation to Improve Ability of Student Representation. *Journal of Physics: Conference Series*, 895(1), 012010.
- Irwansyah, F. S., Lubab, I., & Ramdhani, I. F. (2017). Designing Interactive Electronic Module in Chemistry Lessons. *Journal of Physics: Conference Series*, 895(1), 012009.
- Iskandar, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Puspaga.
- Jalal, F. (2005). *Teachers' quality improvement in Indonesia: New paradigm and milestones*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Nurfajrinah, M. A., Nurhadi, Z. F., & Ramdhani, M. A. (2017). Meaning of Online Shopping for Indie Model. *The Social Sciences*, 12(4), 737-742.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(1), 47-56.
- Ramdhani, M. A. (2013). *Metodologi Penelitian dalam Riset Teknologi Informasi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ramdhani, M. A. (2017). Lingkungan Pendidikan dalam Implementasi Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 28-37.
- Ramdhani, M. A., & Muhammadiyah, H. (2015). The Criteria of Learning Media Selection for Character Education in Higher Education. *International Conference of Islamic Education in Southeast Asia* (pp. 174-182). Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. (2014). Verification of Research Logical Framework Based on Literature Review. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(2), 11-19.
- Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. (2016). *Penelitian Pemasaran*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Robbins, S. (2007). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prehalindo.
- Sari, S., Anjani, R., Farida, I., & Ramdhani, M. A. (2017). Using Android-Based Educational Game for Learning Colloid Material. *Journal of Physics: Conference Series*, 895(1), 012012.
- Siagian, S. (2009). *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (2003). *Competence at Work*. New York: John Willey & Sons.
- Stoner, J. A., & Freeman, R. E. (1989). *Management*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Uno, H. B., & Lamatenggo, N. (2014). *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.